

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

### 1. Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.

Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "heterogen". Di negeri yang besar ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa.<sup>1</sup> Sementara Ainul Yaqin mendeskripsikan dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 1000 etnis atau subetnis.<sup>2</sup>

Di samping banyaknya etnis, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan juga beratus agama dan kepercayaan setempat yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal mereka.<sup>3</sup> Keragaman ini pada dasarnya merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sebagaimana Qodry A. Azizy Menyatakan:

*First of all, religious diversity is a fact in any society. This is what I see. The reason why I call it a fact is because nobody can abolish that state affairs. And in every society we have different religious, with different ethnicities and different races. This is the reality. For the second thing, religious diversity is a "God made" reality....This religious diversity is natural law or Sunnatullah that means nobody can change or abolish it.<sup>4</sup>*

Pendapat di atas menunjukkan bahwa keragaman agama itu merupakan sebuah realitas di masyarakat, oleh karena itu tak seorang pun yang mampu

---

<sup>1</sup>Dody S. Truna, *Pendidikan Islam Berwawasan multikulturalisme* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.), 1.

<sup>2</sup>M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 203.

<sup>3</sup>Dody S. Truna, *Agama dan Masyarakat: Buku Daras Sosiologi Agama* (Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009), 42-47.

<sup>4</sup>Michael Pye, *Religious Harmony "Problem, Practice and Education, Preceding of the Religious conference of International Association for the History of the Religious"* (Yogyakarta, 2004), 1.

menghapuskan kenyataan keragaman agama tersebut. Di berbagai kelompok masyarakat pasti ada keragaman agama yang disertai juga dengan keragaman suku dan ras, ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Keragaman agama merupakan hal yang alami atau sunnatullah yang tak seorang pun mampu menghapuskan dan menggantikannya.<sup>5</sup> Tentu tidak perlu menjadikan keragaman ini sebuah masalah bangsa yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan, hal yang paling penting adalah bagaimana caranya dicarikan solusinya sehingga perbedaan dan keragaman ini menjadi hal yang positif yang mampu memperkaya kreatifitas dan budaya bangsa, dan menjadi nilai-nilai kebaikan bagi semua penghuni alam ini khususnya Indonesia.

Sebenarnya bila renungkan dengan hati yang jernih dan mendalam, munculnya perbedaan dan keragaman di kalangan masyarakat/umat pasti dibarengi juga dengan munculnya keanekaragaman informasi, pendapat, pemikiran dan juga produk budaya di kalangan mereka. Ketika perbedaan dan keragaman mampu disatukan dan dikumpulkan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan yang baik dan kondusif, akan memunculkan sebuah proses interaksi yang positif, seperti saling bertukar pikiran dan pendapat dan saling membantu di antara mereka. Hal seperti ini akan memunculkan sesuatu hal baru dan juga baik. Yang akhirnya perbedaan dan keragaman ini menjadi sebuah kekayaan keilmuan dan kebudayaan yang sangat berharga bagi masyarakat, bangsa dan juga negara.

Munculnya perbedaan dan keragaman bukan hanya dalam hal beragama di antara umat saja, tapi sebenarnya perbedaan atau keragaman terjadi pula dalam hal keyakinan dan kebenaran dalam seagama. Hal ini sering terjadi dan bahkan lebih multi dibanding perbedaan antar umat beragama di Negara ini. Perbedaan dan keragaman ini muncul dan ada di dalam setiap diri agama itu sendiri, salah satu contohnya adalah perbedaan keyakinan dan kebenaran dalam Agama Islam. Perbedaan dalam Agama Islam ini muncul akibat dari perbedaan cara memahami sumber hukum yang ada dalam Agama Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Perbedaan dalam pemahaman sumber hukum ini memunculkan berbagai

---

<sup>5</sup>Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu (Fathir 35 ayat 43). Mufasssir al-Qur'an, (ed. Terjemah tafsir, Hilal, 2010, Bandung), 178.

perbedaan perilaku dalam praktek peribadatan yang mereka yakini dan lakukan. Karena perbedaan pemahaman tersebut akhirnya memunculkan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbeda-beda, ada NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), SI (Syarikat Islam), PUI (Persatuan Umat Islam, PII (Pergerakan Islam Indonesia), Alwasliyah, Mathla'ul Anwar dsb. Bahkan pada saat ini muncul juga Organisasi kemasyarakatan yang baru seperti FPI, Hizbut Tahrir, Ahlu al-Khuru'j, Islam Jama'ah, LDII dan yang lainnya.

Dari kelompok organisasi kemasyarakatan tersebut sering memunculkan *truth claim* yaitu sebuah perasaan dan keyakinan bahwa dirinya dan kelompoknyalah yang paling baik dan paling benar, bahkan lebih jauh lagi mereka menunjuk selain dirinya dan kelompoknya adalah salah. Tidak sampai banyak di antara mereka memaksa agar semua orang mengikuti keyakinan dan kehendak mereka. Perilaku yang seperti ini tentu merupakan perilaku yang seharusnya tidak muncul, karena perilaku ini merupakan perilaku yang sangat negatif dan merupakan bintik-bintik perpecahan di antara mereka khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dicarikan sebuah solusi dan jalan keluarnya agar hal tersebut tidak muncul kepermukaan. Sama halnya di dalam Agama lain seperti agama Kristen, perbedaan pemahaman ini muncul yang akhirnya memunculkan kelompok-kelompok aliran di antara mereka seperti Kristen Katholik, Protestan, Baptis, Ortodok, dsb.

Di samping perbedaan perilaku dan praktek peribadatan, muncul juga kelompok lain yang berbasis pada perbedaan watak dan karakter, ada di antara mereka yang berwatak keras, lunak dan bahkan ada yang berwatak antara keduanya (tidak keras dan tidak juga lunak). Perbedaan kelompok yang berbasis pada perbedaan watak dan karakter inilah sebenarnya yang lebih banyak memunculkan perpecahan atau gontok-gontokan di antara mereka terutama di kalangan kelompok yang berwatak keras, padahal agama apapun yang ada di dunia ini tidaklah pernah membolehkan satu kelompok memaksa kelompok lain untuk mengikuti keyakinan dan keinginannya. Sebenarnya semua agama dan keyakinan manapun pasti menginginkan umatnya dan masyarakat seta bangsanya hidup dalam keadaan rukun dan damai. Sebagai contoh dalam Agama Islam yang

selalu menginginkan umatnya menjadi umat yang satu (*umatun wahidah*) dan mereka bisa hidup rukun dan damai walaupun dalam realitas perbedaan dan keragaman agama dan kebudayaan di antara mereka selalu ada.

Realitas yang ada disekitar menunjukkan bahwa, perbedaan dan keragaman sering menjadai permusuhan dan perpecahan, bahkan sering terjadi, dengan dalih keinginan *mendakwahkan* pemikiran dan keyakinan dari kelompok-kelompok tertentu, mereka melakukan pemaksaan keyakinan mereka kepada orang lain yang akhirnya memunculkan pertentangan, perpecahan dan bahkan menjurus pada perkelahian. Pada umumnya keadaan seperti ini muncul sebagai akibat dari pemaksaan kehendak dari orang-orang atau kelompok orang yang menganggap dan merasa bahwa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar dan paling baik. Kemunculan perilaku seperti ini merupakan bunga-bunga perpecahan dan pertentangan di kalangan masyarakat.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan plural, sebagaimana dijelaskan di atas, baik dari aspek suku, ras, budaya, agama serta status sosial, dan juga jenis kelamin tentu akan memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakatnya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, ras, etnis, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, Sunni dan Syi'ah dan konflik-konflik lainnya telah menyadarkan kita bahwa negara ini masih berada dalam ancaman disintegrasi bangsa dan Negara, sehingga kalau hal ini terus dibiarkan sangat memungkinkan terciptanya disintegrasi bangsa dan Negara yang sangat mengancam NKRI.

Sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menyatukan umat ini, baik melalui diskusi di kalangan masyarakat ilmiah, proses pendidikan, seminar dan bahkan dakwah yang dilakukan para tokoh agama, masyarakat, pengusaha, pejabat bahkan ada juga dari kalangan artis, tapi perpecahan, perpecahan dan gontok-gontokan di antara masyarakat tetap kerap ada dan terjadi. Tentu semua ini tidaklah mudah, karena cara-cara untuk menyatukan umat

tersebut berbenturan dengan aspek kebebasan<sup>6</sup> dalam dakwah yang sangat dijunjung tinggi dan diutamakan. Menurut agama Islam melakukan dakwah tidak diperbolehkan dengan melalui pemaksaan.<sup>7</sup> Dakwah harus dilakukan dengan baik dan bijaksana, dan walaupun ada perbedaan pendapat maka harus dilakukan dengan musyawarah di antara keduanya dengan cara yang baik.<sup>8</sup> Para mad'uwin (orang-orang yang menjadi objek da'awah) tetap berhak memilih antara menerima/menta'ati, memikirkan atau bahkan mengabaikan apa-apa yang didakwahkan para da'i (orang yang mengajak terhadap mad'u).

Cara-cara dakwah yang dilakukan dengan kekerasan tentu tidak sesuai dengan konsep dakwah itu sendiri, bahkan bila hal itu dilakukan bisa dikategorikan pada pelanggaran hukum dengan kategori pelanggaran hak asasi manusia. Dakwah yang tidak baik atau yang dilakukan dengan cara kekerasan dan cenderung memaksa inilah yang banyak memunculkan keadaan yang makin rumit dan pelik tatkala usaha menyatukan umat dalam umat yang satu (*ummatan waahidah*) yang kondusif menjadi harapan semua manusia. Memang setiap orang dapat dan berhak menyebarkan agama yang dianutnya dan hak tersebut dilindungi

---

<sup>6</sup>Dalam Undang-undang ham pasal 18 dinyatakan bahwa: 1) Setiap manusia memiliki hak dalam kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk kebebasan dalam mengambil, memeluk agama atau keyakinan apapun yang ia pilih. Dan dalam mengutarakan baik secara mandiri atau bersama orang lain, baik secara terang-terangan atau tersembunyi terhadap agama dan keyakinannya, termasuk dalam beribadah, melaksanakan dan menjalankan simbol-simbol dan melakukan pengajaran; 2) Tidak boleh memaksa manusia dengan suatu paksaan yang dapat menghilangkan kebebasannya dalam mengambil atau memeluk agama dan keyakinan apapun yang ia pilih; 3) Tidak boleh membatasi kebebasan manusia dalam mengungkapkan agama atau keyakinannya, kecuali dengan batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk menjaga keselamatan umum, aturan umum, kesehatan umum, etika umum ataupun hak-hak orang lain dan kebebasan dasar mereka; 4) Negara-negara dalam perjanjian ini berjanji untuk menghormati para orang tua atau wali lain di saat mereka ada untuk menjamin pendidikan anak-anak yang ada di bawah pengawasannya, dan mendidik mereka secara agama ataupun etika sesuai dengan keyakinan khusus mereka. (Wahbah Ajjuhaeli), 19-22.

<sup>7</sup>Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (Mufassir, Al-Hilal Bandung 2010), 19.

<sup>8</sup>Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk (Mufassir, Al-Hilal Bandung, 2010), 114.

Undang-undang Dasar 1945<sup>9</sup>. *Universal Declaration of Human rights*, maupun deklarasi-deklarasi lainnya. Menjamin kebebasan beragama untuk dimiliki setiap orang.<sup>10</sup> Usaha untuk pengembangan keyakinan keberagamaan dan keyakinan dari sebuah agama atau kelompok agama tentu harus dilakukan dengan cara baik sesuai dengan aturan-aturan tertentu, bahkan undang-undang negara Indonesia pun melarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Penyebaran agama yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan agama ataupun aturan-aturan dari negara, sudah bisa dipastikan akan memunculkan benturan di antara mereka dan bahkan bisa menjurus pada perpecahan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan kondisi "multikultural" di Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga kalangan pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia perlu untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" atau "budaya bangsa" yang benar-benar mampu menjadi sebuah "*integrating force*" (kekuatan untuk menyatukan) yang dapat mengikat dan mengharmonikan seluruh keragaman etnis, suku bangsa, budaya dan agama tersebut<sup>11</sup> sebagai upaya menuju masyarakat madani Indonesia.

## 2. Paham Multikultur (Multikulturalisme)

Abad 21 ini merupakan abad transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Proses transformasi ini terus berlanjut yang pada akhirnya memunculkan sebuah istilah baru yang disebut globalisasi. Pengertian umum globalisasi ini masuk kajian dunia universal pada tahun 80-an, dan pada masa ini

---

<sup>9</sup>Dalam UUD 45 Bab XI pasal 29 menyatakan "ayat 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Buku UUD 4), 14.

<sup>10</sup>Ada 34 macam deklarasi dari berbagai negara tentang perlindungan bagi kebebasan beragama yang dihimpun dalam "*Major International Freedom of Religion or Belief*" dalam *pre Lindlhom ed. Facilitating Freedom of Religion of Beliefs: A Deskbook* (Oslo, Norway: Martinus Nijhof Publisher, 2004), 873.

<sup>11</sup>Muhaemin el-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian awal)* from <http://artikel.us/Muhaemin6-4.html>, akses Selasa 10 Februari jam 20.00



baru merupakan pengertian sosiologi yang dicetuskan oleh Ronald Robertson dari University of Pittsburgh.<sup>12</sup>

Isu globalisasi ini muncul di tengah mencuatnya isu tentang multikulturalisme yang telah berlangsung mulai sejak tahun 1950-an di Kanada. Menurut Kamus Longlet Oxford Dictionary istilah "*Multiculturalism*" merupakan deviasi dari kata "Multikultural" yang berarti "multi" yang dalam bahasa Indonesia berarti banyak dan "Culture" yang berarti budaya. Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal times, yang menggambarkan masyarakat montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual.

Pada gelombang *pertama*, multikulturalisme baru mengandung hal-hal yang esensial dalam perjuangan perlakuan budaya terhadap yang berbeda (*the other*). Dalam tahap selanjutnya yang disebut gelombang *kedua*, multikulturalisme telah menampung berbagai jenis pemikiran baru, di antaranya, pertama, pengaruh cultural studies (kajian-kajian budaya). Cultural studies melihat secara praktis dan kritis masalah-masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan, peranan kelompok marjinal, feminisme, dan toleransi antar kelompok dan agama. Pengaruh kedua muncul dari pengaruh poskolonialisme. Pemikiran poskolonial melihat kembali hubungan antara eks penjajah (*the colonizer*) dengan daerah jajahannya (*the colonized*) yang telah meninggalkan banyak stigma perendahan kaum terjajah. Pandangan-pandangan poskolonialisme antara lain ingin mengungkit kembali nilai-nilai *indigenious* di dalam budaya sendiri dan berupaya melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing.

Pengaruh *ketiga* adalah pengaruh globalisasi. Pengaruh ini ternyata telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Oleh karena itu timbul upaya menentang globalisasi dengan melihat kembali peranan keragaman budaya di masyarakat. Sehingga revitalisasi budaya lokal dipandang mampu mengimbangi proses globalisasi yang cenderung mengarah pada monokulturalisasi budaya dunia.

---

<sup>12</sup>Tilaar, HAR, *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era Globalisasi, Visi, Misi dan program aksi pendidikan dan pelatihan menuju 2020* (Jakarta: Grasindo, 1977), 15.

Pengaruh *keempat* muncul dari gerakan feminisme dan pos-feminisme. Gerakan feminisme yang semula mencari kesejajaran antara perempuan dan laki-laki, kemudian meningkat menjadi tuntutan ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bukan lagi hanya menuntut penghargaan yang sama antar laki-laki dan perempuan, melainkan lebih jauh lagi mereka menuntut mitra sejajar dalam berbagai tugas dan pekerjaan di masyarakat. Pengaruh *kelima* adalah pengaruh pos-strukturalisme. Pandangan ini mengemukakan perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur mapan yang biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada.<sup>13</sup>

Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.<sup>14</sup> Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James, berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang syarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).<sup>15</sup>

Di Indonesia pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia ini terbentuk, yang kemudian hal ini digunakan oleh para pendiri bangsa ini untuk ”mendisain

---

<sup>13</sup>Tilaar, H.A R., *Multikultural*, 83.

<sup>14</sup>Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Somposium Internasional Bali ke 3, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, [www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel/ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel/ps.htm).

<sup>15</sup>Banks, James A. Dan cherry Mc Gee Banks. *Handbook of Research on Multicultural Education*, (2001, San Fransisco:Jorsey Bass), 4-5.



kebudayaan bangsa Indonesia”(*Indonesian Culture Design*) yang berujung pada munculnya sebuah slogan bernegara yaitu “Bhineka Tunggal ika”. Keberagaman yang ada dalam “Bhineka Tunggal Ika” bukan hanya sebagai gagasan dan pemikiran belaka, tapi sudah menjadi tekad, keyakinan dan faham bangsa Indonesia. Kebinekaan ini sebenarnya sudah berlangsung berabad-abad jauh sebelum negara ini terbentuk.<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi juga menyatakan secara jelas bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Atas dasar undang-undang ini, semua warga negara, dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, wajib dilindungi oleh negara. Ini juga berarti negara tidak boleh mendiskriminasi warganya dengan alasan apapun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan konstitusi tersebut.

Indonesia juga negara demokratis. Demokrasi bukan hanya sebagai tujuan, tetapi juga sebagai cara dan jalan berkehidupan bersama masyarakat. Dalam sistem demokrasi, setiap individu mempunyai hak hidup, hak mengeskpresikan pikiran serta pendapatnya, dan lebih dari itu, hak-hak tersebut harus dihormati. Sistem demokrasi meniscayakan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan martabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sejak awal kemerdekaan sudah menyepakati secara bulat konstitusi Demokrasi dan Pluralisme. Pada mukhtamar di Pondok Pesantren Situbondo, Jawa Timur, 1984, NU menekankan kembali komitmen kenegaraan dan kebangsaan tersebut, dan juga menegaskan Pancasila sebagai dasar negara secara final berdasarkan syariat (baca: agama). Salah seorang ulama terkemuka dan kharismatik, KH. Ahmad Siddik, mengemukakan tiga gagasan persaudaraan (*al-ukhuwwah*): pertama *Ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama umat Islam), kedua *Ukhuwwah Wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa) dan ketiga *Ukhuwwah Insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>16</sup>Sebagaimana yang telah ada di jaman kerajaan Sriwijaya dengan sumpah Gajah Madanya yang disebut dengan sumpah “Aru Paku Palapa” (Penyatuan seluruh bangsa yang ada dalam kekuasaan Sriwijaya).

pluralisme telah diterima para ulama Islam yang ada di organisasi kemasyarakatan NU dan Muhammadiyah beserta para pengikutnya atas dasar keyakinan keberagaman mereka yaitu Agama Islam. Penerimaan pluralisme oleh kedua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini merupakan sebuah bukti adanya pengakuan menghargai sesama dan penyatuan umat yang ada di Indonesia sebagai *ummatan waahidah*. Jika hari ini pluralisme masih ditolak, maka hal itu akan menjadi ancaman yang serius bagi sistem kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Apalagi jika penolakan terhadap pluralisme tersebut sampai memicu kekerasan.

Pada perkembangan lebih lanjut, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dalam menjalankan konsep Demokrasi dan Pluralismenya sudah mengarah pada konsep multikulturalisme. Salah satu contohnya adalah konsep kehidupan bermasyarakat yang dikembangkan oleh mantan Presiden Indonesia KH. DR. Abdurrahman Wahid, tatkala beliau menjadi presiden, telah mampu membuka tatanan kehidupan baru bagi para eks Gerakan 30 September PKI yang ada di Indonesia. Para mantan G. 30 S. PKI, bahkan dengan keturunannya, pada masa Orde Baru dilarang menjadi pegawai Negeri Sipil. Gusdur dengan keyakinannya membuka seluas-luasnya bagi eks G 30 S PKI dan keturunannya itu untuk menjadi apapun dan kedudukannya sama dan sederajat dengan kelompok masyarakat lainnya. Walaupun hal ini ditentang oleh banyak kalangan, Gusdur bersama kalangan Nahdiyyin ketika itu, tetap memperjuangkan bagi kebebasan para eks G.30S. PKI ini. Disamping itu Gusdur beserta sebahagian kalangan Nahdiyyin membuka keran kebebasan kehidupan bagi kalangan minoritas Cina yang ada di Indonsia. Salah satunya adalah pertunjukan kesenian Barongsay, yang pada masa Orde Baru pertunjukan ini dilarang keras untuk ditampilkan, pada masa Gusdur jadi persiden, kesenian Barongsay bisa ditampilkan dengan sangat bebas dan terbuka. Hal lain yang Gusdur bebaskan untuk dirayakan adalah perayaan Imlek, yang pada masa Orde Baru perayaan ini dilarang untuk dirayakan, namun pada masa Gusdur jadi presiden perayaan ini pun menjadi bebas dilakukan dikalangan masyarakat umum dengan tanpa ada batasan apapun. Inilah beberapa indikator bahwa Multikulturalisme sudah mulai mengakar dan dilakukan oleh kalangan Nahdiyyin.

Realitas yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah bahwa pemahaman dan perilaku bangsa sudah banyak yang keluar dari konsep dasar tersebut. Artinya, bagi bangsa Indonesia masa kini, konsep multikulturalisme ini kelihatannya menjadi sebuah konsep yang baru dan asing lagi.<sup>17</sup> Kenapa demikian, karena kesadaran tentang nilai yang dibentuk oleh para pendiri bangsa ini sudah banyak terkikis dan menghilang ditelan berlalunya zaman, yang akhirnya konsep multikultural yang telah dibuat dan digagas oleh para pendiri bangsa ini masih belum terwujud dengan sempurna atau mungkin malah makin terkikis dan berkurang. Salah satu proses pengikisan nilai multikultural yang ada di masyarakat Indonesia adalah perilaku pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kesadaran perilaku kehidupan multikultural banyak terpendam dan atau dipendam oleh pemerintah atas nama persatuan dan stabilitas negara/nasional, yang pada akhirnya muncullah paham *mono-kulturalisme* dan di era akhir Orde Baru kita kenal dengan slogan "*Asas Tunggal*". Hal ini menjadi sebuah tekanan utama dan sangat kuat bahkan menjadi sebuah tuntutan yang harus dita'ati dan dilaksanakan oleh bangsa ini tanpa terkecuali siapapun mereka, akhirnya semuanya dipaksa untuk menganut pola yang berkarakteristik "penyeragaman" dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan agama, sehingga sampai saat ini wawasan multikultural bangsa Indonesia akhirnya menjadi sangat rendah.

Perbedaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan, visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi perbedaan perilaku dalam memahami sesuatu. Keragaman dalam berbagai hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai sebuah khazanah kekayaan bangsa dalam berkehidupan sosial dan berbangsa, hal tersebut malah menjadi pertentangan yang menjurus kekisruhan, bahkan disintegrasi bangsa yang sangat mengancam NKRI dalam berbagai keadaan. Kasus Ambon, Tanjung Priuk, Tasik, Haur Kuning Garut, dan Sampang adalah tanda-tanda

---

<sup>17</sup>Parsudi Suparlan, 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal *Antropologi Indonesia ke-3*, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, From:[http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel\\_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm), Akses, Senin, 23 mei 2005, jam 16.00].

berkurangnya bahkan mungkin menghilangnya kondisi multikultural yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Dari sini dapat dikatakan bahwa berbagai kekisruhan etnis yang merebak dibanyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia. Keadaan ini sebenarnya sudah mulai muncul dari sejak indonesia merdeka, yaitu dengan munculnya keinginan memisahkan diri beberapa provinsi Indonesia bagian timur dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun para pendiri bangsa pada saat itu cepat tanggap untuk mencari solusinya sehingga ancaman disintegrasi bangsa dalam NKRI pada saat itu dengan cepat bisa diatasi.

Bintik-bintik perbedaan pemahaman di antara suku bangsa, ras, budaya dan Agama sebenarnya tidaklah serta merta berhenti pada sa'at itu, tapi terus berlanjut yang pada umumnya mulai sangat terasa dan terlihat dengan jelas kemunculannya mulai sejak pertengahan tahun 1997-an dan salah satunya kasus Tanjung Priuk. Perbedaan pemahaman di antara bangsa multi etnis, ras dan agama ini pada dasarnya merupakan akibat dari rendahnya kesadaran dalam berbangsa dan pemahaman dalam wawasan multikultural. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan pemahaman multikultural ini sangatlah penting, karena dengan kesadaran berbangsa dan pemahaman multikultural yang baik inilah NKRI bisa dijaga dan keadaan yang kondusif di negara Indonesia ini bisa lestari.

Perlu diingat bahwa “Konsep multikulturalisme” tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Konsep multikulturalisme lebih dari itu, konsep multikulturalisme lebih dari hanya menekankan pada keanekaragaman secara suku bangsa dan kebudayaan, tapi lebih jauh lagi *yaitu dalam keyakinan kesederajatan di antara suku bangsa, ras dan agama pun menjadi sebuah keharusan.*

Dengan melihat beberapa penjelasan di atas, pendidikan multikultural untuk Negara Indonesia yang sangat multi etnis, multi ras dan multi agama ini dianggap sebuah keniscayaan dan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, apalagi dengan munculnya berbagai konflik baik antar etnis, ras dan agama yang dengan

kasat mata telah kita lihat dan rasakan. Oleh karena itu sudah saatnya seluruh komponen bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini berusaha untuk mencari solusinya untuk menjaga NKRI ini. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan adanya pendidikan multikultural. Dengan cara ini diharapkan pemahaman dan pelaksanaan kehidupan Multikultural bisa exsis lagi di kalangan masyarakat Indonesia.

Azyumardi Azra mendefinisikan, pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Sementara Lee Manning and Baruth mendefinisikan *Multicultural Education is both a concept and deliberate process designed to: 1) teach learners to recognize, accept, and appreciate cultural, ethnic, social class, religious, and gender differences. 2) Instill learners during these crucial developmental years a sense of responsibility and commitment to work toward the democratic ideals of justice, equality and democracy.*<sup>18</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep yang membawa siswa untuk mengakui, menerima dan menghargai budaya, etnic, kelas sosial, agama dan perbedaan gender, di samping itu Pendidikan Multikultural juga harus mampu membimbing siswa selama proses perkembangannya agar punya rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap penghidupan cita-cita keadilan, persamaan dan demokrasi.

Sementara Crendall dalam Dawam melihat pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman etnis, ras, agama dan budaya.<sup>19</sup> Bank and Bank, sebagaimana yang dikutip Azyumardi Azra juga mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai bidang kajian dan disiplin yang muncul yang tujuan

---

<sup>18</sup>Manning, Lee M. And Bruth Leroy G. *Multicultural Education of Children and Adolesen* (Boston and others, Allyn and Bacon A Simon nd and Schuster Company, 1966), 3.

<sup>19</sup>Dawam, Ainurrofiq, *Emoh Sekolah, Menolak komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme intelektual menuju pendidikan Multikultural* (Yogya Karta, Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), 100.

utamanya menciptakan pendidikan yang setara bagi siswa tentang etnis, ras kelas sosial dan kelompok budaya yang berbeda.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, tampaklah jelas bahwa semua pendapat dan interpretasi tentang Pendidikan Multikultural mengarah pada tujuan yang sama yaitu *melalui pendidikan multikultur ini mampu mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur dan sejahtera dengan tanpa mempertentangkan perbedaan ras, status sosial, etnik, agama dan budaya*. Selain itu pendidikan multikultural dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia serta menghargai pluraritas dan heterogenitasnya, sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, ras, etnis, status sosial, dan agama (aliran). Dengan demikian pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun latar belakangnya.

Dalam menegaskan konsep dasar pendidikan multikultural, Tilaar, sebagaimana dikutip Dody S. Truna, mengacu kepada konsep C.I. Bennet yang menunjukkan dua aspek mendasar, yaitu nilai inti dan tujuan pendidikan multikultural. Nilai-nilai inti tersebut mencakup: (1) Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat; (2) Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; (3) Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan (4) Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Berdasarkan nilai inti tersebut maka dirumuskan enam tujuan, yaitu: (1) mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat; (2) memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat; (3) memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat; (4) membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka; (5) mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi; dan (6) mengembangkan keterampilan aksi sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Azra, Azyumardi, *Dari Pendidikan hingga Pendidikan Multikultural Pengalaman Indonesia, dalam edukasi, jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan*, Vol. 2 nomor 4 Tahun 2004, 19-20.

<sup>21</sup>Dody S. Truna, *Pendidikan Agama Islam berwawasan Multikultural*, ed. Telaah kritis atas muatan Pendidikan Multikulturalisme dalam buku ajar PAI di Perguruan Tinggi Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 108.



Sementara pendidikan multikultural dalam UUD No. 20 tahun 2003 nampak belum mengatur secara jelas dan khusus mengenai pendidikan multikultural. Jiwa dari Undang-undang tersebut masih berkuat pada statement "bagaimana mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dan juga kajiannya masih pada tataran idealistik bukan futuristik. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab". Rumusan ini terlihat masih abstrak, walaupun bila dikaji secara mendalam nilai-nilai multikultural memang sudah ada walaupun dalam tataran secara implisit.

## 2. Pesantren Tebuireng.

Tebuireng adalah sebuah Pesantren yang didirikan oleh seorang pendiri Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdlatu Ulama (NU). Nama Tebuireng sendiri adalah nama perdukahan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan berada pada kilometer 8 Kota Jombang kearah selatan. Alasan penulis kenapa Pesantren Tebuireng ini dijadikan sebagai lokasi penelitian penulis adalah karena pesantren ini didirikan oleh seorang pendiri NU didalamnya banyak nilai-nilai multikultur. Kenapa asumsi ini muncul? **Pertama** para alumni lulusan pesantren ini terlihat berkarakterkan nilai nilai multikultur adalah KH. Yusuf Hasyim (pa Ud), KH. Abdurahman Wahid (Gusdur), KH. Solahudin Wahid (Gus Solah), Dr. Yeni Wahid dll. **Kedua** Pendiri Pesantren ini adalah KH. Hasyim Asy'ari seorang pendiri organi kemasyarakatan Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang di dalamnya banyak nilai-nilai pluralis dan multikulturnya seperti *Tawasuth* (selalu berdiri di tengah-tengah), *Tawazun* (selalu berperilaku seimbang), *Tasamuh* (selalu menghargai pendapat orang lain dan mengakomodir berbagai perbedaan, dan *Amar ma'ruf Nahyi Munkar* (mengajak dan memerintahkan melakukan berbagai kebaikan dan menghindari

atau mencegah berbagai kemungkaran dan ketiga bahwa para pemimpin dan tokoh yang ada di pesantren ini sangat menghargai perbedaan baik dari sisi budaya, suku, status sosial dan juga agama. Oleh karena itu Penulis mempunyai asumsi bahwa di pesantren ini telah terjadi proses pendidikan multikultur karena pada umumnya para pemimpin dan alumni dari pesantren ini berkarakter nilai-nilai multikultur.

Pesantren Tebuireng Jombang ini juga letaknya berdekatan dengan sebuah pasar yang cukup ramai, hiruk pikuk para pedagang yang ada di pasar ini tidak menjadi sebuah hambatan bagi pesantren dalam keberlangsungan proses pendidikannya. Pesantren ini juga berdekatan dengan Pabrik Gula Cukir yang didirikan pada tahun 1853. Pabrik ini pada masa kolonial adalah pabrik gula yang sangat besar dan termodern di kawasan Jawa Timur. Para pendiri dan tuan-tuan pemilik pabrik ini pada umumnya agama Nasrani, namun mereka mampu hidup berdampingan dan melakukan kerjasama dalam beberapa hal. Baik yang berhubungan dengan kemasyarakatan maupun keagamaan.

Perdukuhan (Tebuireng) seluas 25,311 hektar ini kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 H. (bertepatan dengan tanggal 03 Agustus 1899 M). Beliau adalah seorang ulama besar yang telah lama belajar dan mendalami ilmu agama baik di dalam maupun luar negeri. Jiwanya merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakat tempat tinggalnya yang sedang dilanda berbagai krisis kehidupan. KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren yang berperan sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Beliau mendirikan bangunan sederhana yang terbuat dari *tratak* (anyaman bambu) yang disekat menjadi dua bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Kyai Hasyim bersama Istrinya, Nyai Khodijah, dan bagian depan dijadikan Mushala.<sup>22</sup>

Pada awal berdirinya, materi yang diajarkan di Tebuireng hanya berupa materi keagamaan dengan sistem *sorogan* dan *bandongan*. Semua bentuk pengajaran masa awal ini berjalan begitu saja dan tidak dibedakan melalui jenjang

---

<sup>22</sup>Susatyo Budi Wibowo, *Dahlan Asy'ari Kisah Perjalanan Wisata Hati*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 119.

kelas. Kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca (*khatam*). Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan menggunakan huruf *pego* (huruf Arab berbahasa Jawa). Seiring berkembangnya waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah, diantaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Jumlah santri yang berhasil masuk kelas musyawarah terhitung sangat kecil karena seleksinya sangat ketat, dan keadaan ini berlangsung cukup lama sesuai perkembangan pembangunan yang sangat lamban karena masa kurun waktu itu masih dalam tekanan penjajah.

Pada tahun 1916 mulailah dirintis pendidikan dalam bentuk klasikal melalui Madrasah. Kepala Madrasah pertama adalah Kyai Ma'shum Ali yang merupakan menantu Kyai Hasyim Asy'ari. Madrasah yang kini bernama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah itu membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan *sifir awwal* dan *sifir tsaniy*, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki madrasah lima tahun berikutnya.<sup>23</sup> Kegiatan belajarnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Seblak yang diasuh Kyai Ma'shum Ali. Jenjang berikutnya adalah Madrasah Ibtidaiyah empat tahun, dimulai dari kelas satu hingga kelas empat yang diselenggarakan di Tebuireng. Tujuan pembelajaran pada umumnya difokuskan pada penguasaan kitab-kitab klasik seperti *Fath al-Qarib* serta hafalan *Nadzam Alfiah Ibnu Malik*. Santri yang masuk jenjang ini adalah lulusan dari jenjang sebelumnya atau setidaknya santri lulusan pondok pesantren lain yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan agama.

a) Visi dan Misi

Visi: "Pesantren Terkemuka Penghasil Insan Pemimpin Berakhlak"

Misi:

- 1) Melaksanakan tata keadministrasian berbasis teknologi
- 2) Melaksanakan tata kepegawaian berbasis teknologi
- 3) Melaksanakan pembelajaran IMTAQ yang berkualitas di sekolah dan pondok
- 4) Melaksanakan pengkajian yang berkualitas kitab Adab al-Alim wa al-Muta'allim dan Ta'lim al-Muta'allim sebagai dasar akhlak al-karimah

---

<sup>23</sup>Ensiklopedia Bebas, *Pondok Pesantren Tebuireng*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok Pesantren Tebuireng](http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Tebuireng). Diakses pada Jumat 23 Maret 2012.

- 5) Melaksanakan pembelajaran IPTEK yang berkualitas
- 6) Melaksanakan pembelajaran sosial dan budaya yang berkualitas
- 7) Menciptakan suasana yang mendukung upaya menumbuhkan daya saing yang sehat
- 8) Terwujud tata layanan publik yang baik

b) Kurikulum

Pada tahun 1919, Kurikulum Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng ditambah dengan materi ajar lain seperti bahasa Indonesia, Matematika dan Geografi. Penambahan materi umum tersebut secara langsung direstui oleh Kyai Hasyim, karena beliau menilai bahwa ketiga ilmu tadi diperlukan oleh para santri. Terobosan ini menjadikan pesantren Tebuireng sebagai pesantren pelopor pembaharu sistem pendidikan Islam tradisional di tanah air. Pesantren yang didirikan pada tahun 1899 ini juga banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat baik dalam masaalah sosial dan juga yang paling utama dalam dunia pendidikan Islam.

Perubahan paling monumental di pesantren Tebuireng terjadi ketika Wahid Hasyim kembali dari Mekkah pada tahun 1933 Bersama Kyai Ilyas yang dipercaya menjadi Lurah Pondok dan Kepala Madrasah. Kyai Wahid Hasyim melakukan terobosan baru dengan mendirikan perpustakaan dan memperpanjang masa belajar madrasah menjadi enam tahun. Hal ini dilakukan karena makin banyak ilmu pengetahuan umum yang ditambahkan.<sup>24</sup> Sebagai asisten ayahnya, Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Wahid Hasyim mengajukan beberapa usulan pembaharuan pendidikan, diantaranya usulan untuk mengadopsi sistem tutorial sebagai ganti metode *bandongan*. Alasannya dalam kelas *bandongan* santri hanya datang untuk mendengar, menulis, menghafal dan tidak ada kesempatan bagi santri untuk mengajukan pertanyaan atau mendiskusikannya. Kyai Wahid Hasyim menyimpulkan bahwa metode *bandongan* membuat santri pasif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Guesichsan, *Pondok Pesantren Tebuireng Sejarah dan Perkembangannya*, <http://guesichsan.wordpress.com/2009/04/30pondok-pesantren-Tebuireng-sejarah-dan-erkembangannya/>. Diakses pada Jum'at 23 Maret 2013.

<sup>25</sup>Achmad Zaini. KH. Abdul Wahid Hasyim, *Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*, (Jombang: Yayasan KH. A. Wahid Hasyim; Forum Indonesia Satu, 2003), 44.

Pernyataan tersebut juga dituturkan Zamarkhsyari Dhofier<sup>26</sup> bahwa antara tahun 1932 dan 1933, sewaktu berumur 17 tahun, Kyai Wahid Hasyim belajar selama satu tahun di Mekah. Sekembalinya ke Tebuireng, ia mengusulkan kepada ayahnya suatu perubahan yang cukup radikal dalam sistem pengajaran di pesantren. Usulan itu antara lain agar sistem *bandongan* diganti dengan sistem *tutorial* yang sistematis, dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri. Ini berarti pengajaran di pesantren tidak terbatas hanya pada pengajian kitab-kitab klasik, melainkan para santri juga diajarkan lebih banyak lagi mata pelajaran umum. Pada tahun 1950, Kyai Wahid Hasyim mengusulkan usul perubahan itu sebagai berikut: mayoritas santri yang belajar di lembaga-lembaga pesantren tidak bertujuan hanya untuk menjadi ulama ansich, tapi mereka juga harus punya kemampuan untuk bergaul dengan masyarakat yang multi etnis, multi ras, multilevel dan strata juga multi agama. Hal ini sangat penting karena para lulusan pesantren tidak hanya akan berhadapan dengan masyarakat agamis saja tapi akan berhubungan juga dengan masyarakat Indonesia yang sangat multikultur’

Wahid Hasyim juga mengusulkan agar kebanyakan santri yang datang ke pesantren tidak berharap menjadi ulama ansich. Para santri perlu juga diberi kemampuan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa lainya yang digunakan secara internasional, disamping itu juga mereka perlu diberi pengetahuan karya-karya klasik abad pertengahan. Namun Hasyim Asy’ari tidak setuju dengan dua usulan tersebut, dengan alasan bahwa kedua usulan tersebut terlalu radikal dan sangat bertolak belakang dengan pemikiran pesantren saat itu. Akan tetapi Hasyim Asy’ari mengizinkan putranya untuk mendirikan institut baru tahun 1935 dan diberi nama Madrasah *Nizamiyah* yang di dalam kurikulumnya mengandung materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, juga ada pelajaran umum, sehingga struktur kurikulumnya menjadi 70% berisikan pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.

---

<sup>26</sup>Zamarkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 176.

Berdirinya madrasah Nidzamiyah tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sistem pengajian klasik dan kelas musyawarah yang ada, Hal ini terjadi karena segmen santri yang belajar di kedua lembaga atau kelas ini memang berbeda. Jika kebanyakan murid madrasah Nidzamiyah adalah anak usia sekolah, maka peserta kelas musyawarah dan pengajian adalah para santri senior atau bahkan Kyai yang sengaja datang ke Tebuireng yang kedatangannya bukan untuk sekolah akan tetapi hanya untuk mengaji.

Pada tanggal 25 Juli 1947, Kyai Hasyim meninggal dunia dan pengasuhan pesantren dilimpahkan kepada putranya yang bernama Kyai Wahid Hasyim, Dalam kurun tiga tahun, sistem kepesantrenan yang dikelola oleh beliau tidak banyak berubah, kecuali dibentuknya Madrasah tingkat Tsanawiyah. Pada awal tahun 1950, Kyai Wahid Hasyim diangkat oleh Presiden RI menjadi Menteri Agama yang pertama dan Kyai Abdul Karim menggantikan Kyai Wahid Hasyim sebagai pengasuh Pondok Pesantren. Unit-unit Tebuireng pada masa Kyai Abdul Karim mulai diformalkan disesuaikan dengan sistem persekolahan nasional dan tingkatan-tingkatannya sebagai berikut; Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), Madrasah Aliyah (setingkat SMA) dan Madrasah Mu'allimin.<sup>27</sup>

Satu tahun berikutnya pengasuhan Pondok Pesantren Tebuireng diserahkan kepada Kyai Baidlowi. Dalam kurun setahun kepemimpinan dan pengurusan Pondok Pesantrennya Kyai Baidlowi masih tetap melestarikan sistem yang dijalankan oleh Kyai Abdul Karim dan tidak ada perubahan sama sekali walaupun ada perbedaan mungkin hanya dalam gaya kepemimpinannya. Lalu pada tahun berikutnya pada masa kepemimpinan Kyai Abdul Kholiq Hasyim ada penambah lembaga baru yang disebut kelas intensif kitab salaf, yang kemudian Kelas tersebut secara khusus dibina oleh Kyai Idris Kamali. Pada masa beliau juga didirikan beberapa perkumpulan yang diantaranya adalah Persatuan Olah raga Pelajar Islam Tebuireng (POPIT) dan organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII).

---

<sup>27</sup>A. Mubarak Yasin, Karyadi dan Fathurrahman, *Profil Pesantren Tebuireng*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 4-5.



Kyai Kholik wafat pada tahun 1965, tiga bulan sebelum pecahnya peristiwa G30S/PKI. Sebagai penggantinya, keluarga besar Tebuireng menunjuk Kyai M. Yusuf Hasyim (Kyai Yusuf). Beliau memimpin Tebuireng ini cukup lama hampir selama 41 tahun. Pola pengasuhan pesantren pada masa Kyai Yusuf Hasyim bersifat kolektif dan kolegal. Kebijakan bersifat manajerial dan administratif berada di tangan Kyai Yusuf, sementara pengajaran kitab-kitab klasik dibawah pengurusan Kyai Idris yang kemudian dipasrahkan pada Kyai Syansuri.

Pada era Kyai M. Yusuf Hasyim ini dilakukan beberapa terobosan yang diantaranya mulai dibentuk sebuah pola kepengurusan baru yang disebut “Dewan Kyai” yang beranggotakan sejumlah Kyai sepuh Tebuireng. Tugas **Dewan Kyai** utamanya adalah memberikan nasehat dan pertimbangan untuk kemaslahatan pondok pesantren. Selanjutnya untuk menangani kegiatan operasional sehari-hari, dibentuk lembaga kepengurusan pondok pesantren yang disebut dengan **Majlis at Tarbiyah wa at-Ta’lim**, dan pada tahun 1990-an lembaga ini berubah nama menjadi **Badan Pembina Santri**.<sup>28</sup>

Terobosan lain yang ada pada era kepengurusan Kyai M. Yusuf Hasyim adalah pendirian *Universitas Hasyim Asy’ari* yang kemudian berubah nama menjadi *Institut Keislaman Hasyim Asy’ari* (IKAHA). Akan tetapi tahun 2011, IKAHA bergabung kembali ke Pesantren Tebuireng dengan otoritas dan otonomi khusus.<sup>29</sup> Pada tahun 1971 didirikan Madrasatul Hufadz, yang kemudian terpisah dan berdiri sendiri dengan nama pondok baru yaitu *Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an*. Kemudian Pada tahun 1972 berdiri juga Sekolah Persiapan Tsanawiyah (SP), pada tahun 1973 Koperasi Serba Usaha Tebuireng (yang kini bernama Koperasi Tekad Mandiri). Pada awalnya koperasi ini bekerjasama dengan Koperasi Kabupaten Jombang, dan pada saat sekarang koperasi ini sudah berdiri sendiri. Kemudian pada tahun 1970 berdiri juga SMP dan SMA. Wahid Hasyim (hasil dari usulan Abdurrahman Wahid/Gusdur). Yayasan Hasyim Asy’ari (tahun 1984), *Markaz Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah* (hasil kerjasama dengan Universitas King Abd. Aziz), Pusat Informasi Pesantren (PIP), Pusat Data

<sup>28</sup><http://www.Tebuireng>. *Pondok Pesantren Tebuireng*, diakses pada Jum’at 23 Maret 2012.

<sup>29</sup>Achmad Zaini. KH. Abdul Wahid Hasyim, *Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*, 67.

Pesantren (PDP), dan Unit Kesehatan Pondok (UKP) dan kemudian menjadi poliklinik Pesantren Tebuireng), Unit Jasa Boga (tahun 1990) dan Ma'had Aly pada tahun 2006.<sup>30</sup>

Beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Kyai Yusuf menyerahkan posisi pengasuh Tebuireng pada keponakannya, KH. Sholahudin Wahid (Gus Sholah). Selama masa kepemimpinan Gus Sholah hingga sekarang, semua unit pendidikan warisan Kyai Yusuf dilestarikan namun dibarengi dengan upaya revitalisasi agar lebih maju dan modern, seperti sistem rekrutmen kepala sekolah di tiap unit yang selalu melalui uji kelayakan (*fit and proper test*). Penembangan lain juga dilakukan seperti dikembangkannya Madrasah Diniyah, pendirian Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dan unit-unit lainnya.<sup>31</sup>

Dari sejak pendiriannya pada tahun 1899, Pesantren Tebuireng telah mampu mencetak sejumlah mahasiswa yang mampu mencapai dan memiliki kemampuan pengetahuan Islam yang tinggi. Dan ini tidak memerlukan waktu yang sangat panjang hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja Pesantren Tebuireng telah mampu mengembangkan dirinya menjadi sebuah pesantren yang besar di Negara Republik Indonesia ini. Hal ini tentu ada penyebab yang sangat kuat dalam pengembangannya. Adapun penyebab besarnya pesantren ini adalah pengaruh dari kebesaran seorang pendirinya yaitu Hadratus-Syekh K.H. Hasyim 'Asy'ary. Beliau adalah seorang Kyai yang tinggi dalam ilmu pengetahuannya terutama dalam pengetahuan Islamnya. Beliau juga memiliki kecakapan berorganisasi dan menajerial yang tinggi pula.

### 3. Pondok Pesantren al-Hikam Depok

Di sebuah tempat yang ramai dengan kehidupan para mahasiswa berdirilah sebuah pesantren yang bernama Pesantren al-Hikam. Pesantren ini resmi berdiri pada 17 Ramadhan 1413 bertepatan dengan 21 Maret 1992, yang berlokasi di jalan H. Amat No. 21 RT 07 RW 01 Kelurahan Kukusan Beji Kota Depok Jawa Barat. Pesantren al-Hikam ini diramaikan juga dengan hiruk pikuk kehidupan

<sup>30</sup>A. Mubarak Yasin, Karyadi dan Fathurrahman, *Profil Pesantren Tebuireng*, 22.

<sup>31</sup>Agung Sasongko, *Pesantren Tebuireng Memiliki Gedung Baru*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/3/14/m0vrln-pesantren-tebuireng-miliki-gedung-baru>, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

mahasiswa dari berbagai daerah, etnis dan berbagai status sosial masyarakat. Begitu juga dalam hal keagamaan, pesantren ini banyak didatangi oleh orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan. Keadaan ini dipengaruhi oleh keberadaan sebuah perguruan tinggi Universitas Indonesia (UI). Dengan keadaan lokasinya yang berdekatan dengan kompleks Universitas Indonesia (UI), pesantren ini juga biasa disebut dengan nama Kutek (Kukusan Teknik). sebutan ini digunakan karena letaknya yang tepat di belakang Fakultas Teknik UI.

Kawasan Ponpes. Al-Hikam ini merupakan kawasan pendidikan, ekonomi, dan merupakan kawasan strategis bagi pengembangan khasanah keilmuan masyarakat. Keadaan masyarakat di kawasan ini juga sangat heterogen dan majemuk karena pada umumnya mereka merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah bahkan negara. Pesantren ini juga sering disebut dengan Pesantren mahasiswa Al-Hikam karena yang tinggal dan mondok di pesantren ini banyak para mahasiswa baik mahasiswa dari perguruan tinggi al-Hikam maupun dari perguruan tinggi di sekitar pesantren terutama dari UI perguruan tinggi yang terdekat dengan pesantren

Pendirian Pondok Pesantren al-Hikam merupakan hal yang istimewa karena didirikan dengan hasil jerih payah sang pendiri sendiri yakni K.H. Hasyim Muzadi. Sebagai pelopor pesantren khusus mahasiswa, al-Hikam berkeinginan untuk menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu memadukan dimensi positif perguruan tinggi yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dimensi positif pesantren yang menjadi wahana penempaan kepribadian dan moral yang benar (hak) berdasarkan nilai-nilai Islam.

Ponpes Al-Hikam memiliki tujuan yang khas yaitu mempersatukan antara pembelajaran di Perguruan Tinggi dan pembelajaran Ilmu Agama di Pesantren. Dengan pola ini Al-Hikam diharapkan dapat mencetak penerus yang kuat dan mumpuni baik dalam ilmu pengetahuan umum dan dan ilmu agama Islam yang digali dari sumber-sumber keagamaan yang pokok (asli). Walaupun sering disebut pesantren mahasiswa bukan artian dipesantren ini hanya para mahasiswa yang belajarnya tapi Di tempat ini juga berdiri beberapa lembaga pendidikan lainnya yaitu lembaga pendidikan dasar (MI, SD dan SMP), Sekolah menengah atas

(SMA, SMK dan juga MA) dan lembaga pendidikan Tinggi yaitu sekolah tinggi Kuliyyatul Quran (STKQ), disamping itu ada juga lembaga Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Pesantren Mahasiswa (Pesma).

Awal berdiri pesantren mahasiswa al-Hikam ini digagas oleh KH. A. Hasyim Muzadi, seorang Ulama yang sangat karismatik dan moderat, beliau sangat terkenal dan dikenal sebagai Ulama yang sangat toleran yang kemudian dikenal dan diberi julukan sebagai Bapak Pluralisme. Sebagai Ulama besar, ia merasa memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk berkhidmat pada umat sebagaimana yang telah dipesankan oleh para gurunya. Ada tiga dasar pemikiran utama dari beliau “kenapa pondok pesantren Mahasiswa ini harus terwujud”, pertama adalah alasan Romantisme sejarah, yaitu bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga menuntut ilmu di pondok pesantren sudah menjadi sebuah tradisi dan akar yang kuat di kalangan masyarakat. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan tuntutan era modern mampu mengubah referensi kehidupan di kalangan masyarakat dan keluarga Muslim sendiri dalam pemilihan lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Diera modern ini banyak kalangan masyarakat yang telah lupa terhadap lembaga pendidikan Pesantren ini. Pondok pesantren yang sudah terbukti mampu melahirkan tokoh-tokoh besar di Negara kita, lambat laun dianggap sebagai lembaga pendidikan yang sudah tertinggal zaman sehingga sekolah-sekolah umum berubah menjadi primadona. Fenomena seperti di atas rupanya juga dirasakan oleh keluarga Hasyim Muzadi sendiri. Oleh karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menggagas sebuah pesantren yang akan menjadi wadah pengemblengan ilmu agama dan juga melahirkan generasi yang memiliki peran di berbagai bidang untuk menjawab kebutuhan era modern seperti sekarang. Hingga akhirnya tradisi pendidikan pondok pesantren pun terus berlanjut dan berkembang.

Kedua, alasan strategis. Hasyim Muzadi yang sangat aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan, politik, dan organisasi masyarakat, paham betul terhadap kondisi di Indonesia. Lulusan Perguruan Tinggi sudah barang tentu akan menempati posisi-posisi strategis di dalam mobilitas zaman

baik dalam pemerintahan maupun di sektor-sektor lain. Para lulusan ini perlu dibekali pengetahuan agama yang matang sehingga ketika menjalankan amanah dan peran sesuai bidang masing-masing, tidak keluar dari koridor syariat agama Islam. Itulah kenapa santri dari kalangan mahasiswa menjadi target sasaran pesantren al-Hikam. Dan harapannya, al-Hikam mampu melahirkan penerus bangsa yang mempunyai integritas ke-Islaman dan keilmuan yang baik dan tinggi.

#### 4. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan atas dasar kesadaran dan keinsyapan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Manusia berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan dan menolak berbagai bahaya yang akan menimpa terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu membantu dan persaudaraan (silaturahmi) merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (al ukhwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.<sup>32</sup>

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikutnya yang didirikan pada *16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926* yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam atas dasar bahwa agama Islam merupakan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam) dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan hidup bagi segenap umat manusia di dunia dan akhirat. Dasar tujuan, pendirian Nahdlatul Ulama tersebut paling tidak menumbuhkan tiga sikap yang penting yaitu sikap keagamaan, kemasyarakatan dan bernegara.

##### a. Sikap Keagamaan

- 1) Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.
- 2) Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti paham ahlussunnah waljama'ah

---

<sup>32</sup>KH. Muchsin Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Kalista, 2007), 24.

dan menggunakan jalan pendekatan (al-Madzhab), dengan tanpa menafikan faham atau pendapat yang lainnya.

- 3) Di bidang Aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti faham ahlussunnah waljama'ah berdasarkan faham al-Imam abu Hasan al-'Asy'ary dan Imam Mnsyur al-Maturidzi, dengan tanpa menafikan aqidah yang lainnya.
- 4) Di bidang Fiqh, Nahdlatul Ulama berada dalam pendekatan (al-Madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Annas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan tanpa menafikan madzhab yang lainnya.
- 5) Di bidang Taswuf, NU mengikuti antara lain: Imam al-Junaed al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan Imam-Imam yang lain yang sejalan dengan aqidah ahlussunnah wal jama'ah, dengan tanpa menafikan Imam-Imam di luar Imam ahlussunnah wa al-Jama'ah.

Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki manusia. paham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama ini bersifat menjaga hal-hal baik yang dilakukan para pendahulu dan mengambil hal baru yang lebih baik dibanding yang terdahulu.

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Oleh karena itu keberadaan Nahdlatul Ulama pada intinya untuk menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada, yang menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan agama dan juga berusaha menanamkan hal-hal yang baru yang dianggap lebih baik dibanding yang terdahulu. Oleh karena itu keberadaan Nahdlatul Ulama tidak bertujuan menghapus nilai-nilai baik yang telah ada, tapi tetap melestarikannya sembari terus mencari hal yang baru yang lebih baik.



## b. Sikap Kemasyarakatan

### 1) Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap I'tidal adalah sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berperilaku 'adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap ini Nahdlatul Ulama akan menghindari segala sikap yang bersifat ekstrim (*Tatharruf*) dan memaksakan kehendak (al-ikroh) kepada siapapun.

### 2) Sikap Tasammuh

Sikap ini adalah sikap yang mencerminkan toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam sikap keagamaan (terutama dalam mas'alah furu' dan hilafiyah) maupun dalam masalah kemasyarakatan, kebudayaan dan kenegaraan. Dengan sikap ini NU menghindari diri dari sikap menyalahkan orang lain, yang dianut NU adalah hanya melakukan dakwah (mengajak orang-orang) untuk menuju jalan baik dan benar, dengan tanpa pemaksaan kehendak. Dari dakwah yang dilakukannya NU mempersilahkan kepada seluruh Mad'uwiin (orang-orang yang diajak) untuk memilih menerima dan atau menolaknya.

### 3) Sikap Tawazun

Sikap ini adalah sikap yang mencerminkan keseimbangan dalam berkhidmah. Yaitu menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

### 4) Amar Ma'ruf Nahyi Munkar

Sikap ini adalah sikap yang mencerminkan kepekaan NU untuk selalu mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfa'at bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.<sup>33</sup>

Apabila dikaji dengan kajian yang lebih mendalam, dasar keagamaan dan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, sebagaimana dijelaskan di atas, dasar tersebut memunculkan perilaku perseorangan maupun kelompok sebagai berikut ;

- Kasih mengasihi antar sesama

<sup>33</sup>KH. Muchsin Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. 26-27.

- Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam
- Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
- Menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah dan berjuang
- Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), Persatuan (*al-Ittihad*) serta Meluhurkan kemulyaan moral (*al-Akhlak al-Karimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*al-Sidqu*) dalam berpikir, bersikap dan bertindak
- Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara
- Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- Menjunjung tinggi dan menghrgai ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya
- Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia
- Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya
- Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara

Hal-hal tersebut di atas bila kita kaitkan dengan pemahaman Pendidikan Multikulturalisme, terlihat sangat jelas bahwa nilai-nilai multikultural di Nahdlatul Ulama sangatlah kuat, sehingga perlu kiranya kita kaji lagi dengan lebih kritis dan mendalam sehingga akan lebih nampak terlihat nilai-nilai multikultural di organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini, lebih jauh lagi dalam nilai-nilai Pendidikan Multikulturalnya.

#### c. NU dan kehidupan Bernegara

Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha menyatukan diri dengan perjuangan Nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama dengan secara sadar telah mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, serta aktif dalam penyusunan UUD

1945, dari sejak perjuangan kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan dan bahkan sampai saat sekarang.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Oleh karenanya Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 karena sikap tersebut sepenuhnya ada dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai Organisasi Keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari ummat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*tasammuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga negara yang punya keyakinan yang sama maupun berbeda untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari atas hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara, dan dalam kancah perpolitikan, Nahdlatul Ulama, pada saat sekarang setelah kembali ke khittah 26, dalam kiprahnya sebagai *Jam'iyyah* (organisasi), tidak terkait dengan organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan manapun juga, namun sebagai warga, setiap anggota yang ada di Nahdlatul Ulama mempunyai hak-hak politik yang sama dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya semua warga Nahdlatul Ulama punya hak untuk menyalurkan hak politiknya dengan bebas dan tanpa ada paksaan dari organisasi untuk berafiliasi kepada salah satu kelompok manapun.

Dari beberapa penjelasan di atas tercermin dan terlihat dengan jelas ada beberapa nilai-nilai multikultural yang dianut oleh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, baik Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan maupun Nahdlatul Ulama sebagai bahagian komponen bangsa yang ada di negara Indonesia. Hal ini tentu akan berimbas pada pelaksanaan proses pendidikan yang ada di Pesantren-Pesantren Nahdlatul Ulama, yang

akhirnya dari proses yang dilakukan oleh Lembaga kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama menjadi salah satu model atau sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi atau menanggulangi kekisruhan yang ada dalam negara Republik Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian dalam penelitian dipesantren yang betradisi Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai berikut:

1. Pola dan Sistem Pendidikan di Pesantren yang betradisi Nahdlatul Ulama
2. Hasil Pendidikan Pesantren yang betradisi Nahdlatul Ulama
3. Nilai-Nilai karakter lulusan Pesantren yang betradisi Nahdlatul Ulama
4. Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam proses pendidikan di pesantren yang betradisi Nahdlatul Ulama
5. Model pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia berbasis pola pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren betradisi Nahdlatul Ulama

Adapun lembaga yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur sebagai pesantren Salaf dan pendirinya adalah Pendiri Organisasi Nahdlatul Ulama yaitu KH. Hasyim Asy'ari, dan Pesantren al-Hikam Depok yang pendirinya adalah KH. Hayim Mujadi sebagai wakil Ro'is 'Am PBNU sekarang. Alasan penentuan kedua lokasi ini karena masing-masing pesantren dibina oleh Pembina yang benar-benar tahu tentang Nahdlatul Ulama. Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren salafiyah betradisi Nahdlatul Ulama dan didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu KH. Hasyim 'Asy'ary. Adapun pembinaan pesantren tersebut sekarang dilanjutkan oleh anak cucu dari KH. Hasyim 'Asy'ary seperti KH. Solahudin Wahid, (cucu dari KH. Hasyim: Asy'ary dari anak beliau yaitu KH. Wahid Hasyim) dan keluarga lainnya seperti dari keluarga KH. Abdurrahman Wahid. Sementara Pesantren Al-Hikam adalah salah satu dari Pesantren Modern yang betradisi Nahdlatul Ulama, yang ketuanya

adalah KH. Hasyim Mujadi, salah satu pengurus PBNU yang ada sekarang. Kedua pesantren tersebut di atas merupakan wakil dari pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama yang bercorak salafiyah dan juga modern.

Apabila kita rumuskan fokus penelitian dari penelitian di atas ke dalam kalimat pertanyaan penelitian, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jawa Timur dan Al-Hikam Depok Jawa Barat?
2. Nilai-nilai pendidikan multikultur apa saja yang ada di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Jawa Barat?
3. Bagaimana hasil proses pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Depok Jawa Barat?
4. Bagaimana sikap dan pelayanan pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Depok Jawa Barat?

### **C. Fokus, Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian, yang diharapkan bisa disumbangkan dan bisa bermanfaat baik institusi yang dijadikan lokasi penelitian dan juga Negara bangsa Indonesia pada umumnya, adalah “*Model pendidikan multikultural yang bisa diimplementasikan di pondok Pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama dan juga di Negara dan bangsa Indonesia pada umumnya*”. Untuk mengkaji hal ini, peneliti memformulasi hasil temuan dari penelitian dan teori-teori pendidikan Multikultural yang ada sehingga bisa ditemukan Model Pendidikan Multikultural yang bisa di implementasikan di pesantren-pesantren bertradisi Nahdlatul Ulama dan juga Negara dan bangsa Indosnesia pada umumnya sesuai kebutuhan kondisi masa kini.

Untuk mengkaji hal tersebut di atas tentu tidaklah mudah, untuk mempermudah dalam memformulasi Model Pendidikan Multikultural ala Indonesia terebut, peneliti melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh budayawan, tokoh sosiologi dan tokoh masyarakat, sehingga formulasi Model

Pendidikan Multikultural yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya dan bisa diimplementasikan di lapangan.

## 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a) Pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jawa Timur dan Al-Hikam Depok Jawa Barat.
- b) Nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Jawa Barat.
- c) Hasil proses pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Depok Jawa Barat.
- d) Sikap dan pelayanan pendidikan multikultural di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan Pesantren Al-Hikam Depok Jawa Barat.

## 3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara teoretis

- a) Dari segi pengembangan Ilmu Pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk memperkaya teori pendidikan, terutama dalam pendidikan Agama Islam dalam rangka mendidik manusia agar mampu memiliki sikap toleran, saling menghargai, saling membantu dalam hal kebaikan dan saling menjaga dari hal-hal kemunkaran. Masyarakat sudah pada tahu, walaupun tidak mendalam, bahwa pesantren adalah salah satu tempat pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam dan bahkan diasumsikan memiliki wawasan multikultural yang cukup signifikan. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk dikaji secara mendalam dan untuk ditemukan modelnya. Merupakan sebuah fakta juga bahwa pada sa'at sekarang multikulturalisme di negara kita Republik Indonesia kebanyakan-nya masih dalam tataran konsep dan teoretis, sementara tataran praktisnya masih sangat jarang kita temukan di dunia pendidikan ataupun di kalangan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan mampu memunculkan sebuah teori baru yaitu model



pendidikan multikultural yang bisa diimplementasikan di berbagai daerah dan tempat.

- b) Dari sisi partisipasi dalam memperkaya konsep, teori dan model pendidikan Multikultur, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya konsep, teori serta model pendidikan di Indonesia sebagai model pembelajaran terutama proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan budaya toleransi, saling menghargai dan saling menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Secara Praktis

- a) Dalam pengembangan kerukunan kehidupan bermasyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari keterpurukan pemahaman dan pengamalan wawasan Multikultur masyarakat Negara Republik Indonesia. Pada sa'at ini kita melihat dengan secara kasat mata bahwa diantara sebahagian masyarakat, banyak sekali yang mengabaikan atau bahkan melupakan nilai-nilai multikultur diantar mereka, sehingga kerukunan di antara warga masyarakat dan bangsa dan bahkan dikalangan elit politik bangsa ini sudah menjadi hal yang sangat mahal. Kita melihat, jangankan dimasyarakat bawah, dikalangan atau kelas atas/pejabat pun kerukunan ini sudah menjadi hal yang sulit untuk diciptakan. Kita lihat di media masa, Televisi, umpamanya, setiap hari bahkan setiap sa'at, pertentangan, saling menggunjing bahkan perkelahian diantara kelompok masyarakat, budaya, etnis, agama bahkan kalangan pejabat (pemangku pemerintahan) terlihat dengan jelas dan ditayangkan hampir setiap sa'at di berbagai media masa terutama di berbagai TV.
- b) Dengan demikian harapan yang lebih khusus dari hasil penelitian ini adalah untuk menemukan model system Pendidikan Multikultural dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan

multikultural masyarakat Indonesia dan men-ciptakan budaya Multikulturalisme ala Indonesia.

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Dodi S. Truna. 2012. *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, Disertasi Konsentrasi Pendidikan Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Temuan penelitian ini menjelaskan adanya kecenderungan yang berbeda di kalangan penulis buku ajar PAI di perguruan tinggi umum dalam merespon setiap tema multikulturalisme. Pada teman-teman tentang akidah dan hukum Islam pandangan mereka berbeda dengan perspektif multikulturalisme, sementara pada tema-tema lainnya, khususnya yang menyangkut hubungan antar manusia, banyak kesamaan pandangan dengan konsep multikulturalisme. Isu-isu pokok yang muncul dari wacana multikulturalisme sepanjang tulisan mereka adalah menyangkut tujuh persoalan: *Truth claim, prejudice, value judgement, stereotype, diskriminasi, toleransi dan batasan-batasannya*, dan isu mayoritas – minoritas.

2. M. Saroni. 2012. *Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Multikultural pada Lembaga Pendidikan Non Formal* (Kasus Gerakan Dakwah pada Masyarakat Multietnis di Kecamatan Lambukibang Kabupaten Tulangbawang Barat Lampung). Disertasi Konsentrasi Pendidikan Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Simpulan dari disertasi di atas, adalah: 1) kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural pada lembaga pendidikan non formal dengan model rekontruksi merupakan bekal para da'i dalam berdakwah ditengah kehidupan masyarakat yang multietnis; 2) pengkanderaan da'i dari berbagai kelompok etnis untuk mengakomodir para peserta pengajian di majlis ta'lim dari berbagai kelompok etnis; dan 3) lembaga swasta atau pemerintah secara agresif memotifasi dan memfasilitasi para da'i untuk mensosialisasikan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural.

3. Zainal Abidin. 2014. *Pendidikan Toleransi Masjid PUSDAI* (Studi Kasus Pendidikan Toleransi pada Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat).

Disertasi Konsentrasi Pendidikan Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan toleransi yang dilakukan di Masjid PUSDAI Jawa Barat adalah untuk mewujudkan masyarakat memiliki sifat terbuka, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan, tetapi memiliki loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing, yang didasarkan pada keluasan wawasan keimanan, akhlak mulia, demokratis, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia dalam kerangka Iman, Islam dan Ihsan. Program Pendidikan Toleransi yang dilaksanakan di masjid PUSDAI Jawa Barat, dapat diklasifikasikan pada dua kategori, yaitu: program kegiatan rutin yang terkait langsung dengan kegiatan *ibadah mahdlah* dalam bentuk *khithabah*, kajian rutin dan tutorial, serta program insidental yang diorientasikan pada pengokohan kehidupan beragama yang tidak disekat-sekat oleh perbedaan. Sementara proses pendidikan yang digunakan adalah melalui jalur nonformal dengan menggunakan media atau saluran-saluran yang secara spesifik mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki masjid, baik saluran secara fungsional yang dimiliki masjid. Sedangkan teknik evaluasi pendidikan toleransi yang digunakan di masjid PUSDAI Jawa Barat adalah menggunakan *Goal Free Evaluation Model* (Model Evaluasi Bebas Tujuan) yaitu sebuah model evaluasi yang didasarkan tidak hanya pada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah program kegiatan, tetapi lebih berorientasi pada pihak eksternal, pihak masyarakat, pihak peserta program, yaitu terfokus pada perilaku yang ditampilkan oleh setiap personal yang mengikuti program kegiatan.

4. Tedi Priatna. 2015. *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Berwawasan Kebangsaan* (Studi Kasus di Sekolah Atas Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung). Disertasi Konsentrasi Pendidikan Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran PAI di SMAT Krida Nusantara, baik pada jam pelajaran di kelas, maupun di luar kelas merupakan implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal yang terprogram. Pembelajaran PAI di luar kelas bukan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang

bersifat pilihan dan tambahan, tapi merupakan keharusan dan tuntutan kurikulum; 2) Fokus dari model pembelajaran PAI di SMAT Krida Nusantra adalah membiasakan dan membentuk akhlak mulia. Oleh karenanya sistem sosial dan suasana pembelajaran dibangun melalui pembiasaan-pembiasaan. Sintak model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung dan pembelajaran kooperatif. Selain visi dan misi yang memposisikan pendidikan agama sebagai salah satu pilar pendidikan, kemampuan guru yang baik, faktor pendukung yang tak kalah penting adalah ketersediaan sarana prasarana; 3) Di sekolah berwawasan kebangsaan SMAT Krida Nusantara, penerapan model pembelajaran PAI diintegrasikan dengan sistem terpadu boarding school dan sekolah wiyata mandala melalui budaya disiplin sebagai karakter utama budaya sekolah.

5. Deden Syarif Hidayatulloh. 2016. *Pembentukan Perilaku Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Penelitian di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Telkom). Disertasi Konsentrasi Pendidikan Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) PAI di ITB dan Tel-U mempunyai posisi strategis terhadap pembentukan perilaku toleran, sumber nilai dan pedoman; 2) Kebijakan dalam membentuk perilaku toleran didasari lemahnya memahami perilaku toleran, adanya konflik, menentukan kesadaran, cara pandang, bersikap terhadap realitas keberagaman; 3) Implementasi kebijakan PAI dalam membentuk perilaku toleran beragama melalui proses KBM, pembiasaan, peneladanan, pemotivasian, penegakan aturan, diintegrasikan ke ekstrakurikuler; 4) Evaluasi dilaksanakan secara kontinu melalui UTS, UAS, Tugas dan Monitoring; 5) Faktor pendukung pemerintah, institusi, manajemen pengelolaan, penegakan aturan, dosen, kurikulum, program, sarana prasarana, dan faktor penghambat jumlah dosen, mahasiswa kurang berminat, terbatas waktu KBM, ketersediaan buku; 6) Problem yang dihadapi dalam implementasi PAI, Islam dikaji sebagai objek ilmu saja, tidak mempunyai strategi penyusun dan pemilihan materi, kurangnya penjelasan dan penguasaan materi ajar, metode dari *teacher centered ke student centered*, PAI lebih berorientasi kognitif, rendahnya moral

dan budaya baca; 7) Tingkat keberhasilan kebijakan PAI dalam membentuk perilaku toleransi beragama dilihat dari terbangunnya pemahaman, praktek, dan dialog keagamaan, menghargai, menghormati, kerjasama, dan hidup rukun.

Relevansi persamaan dengan penelitian yang peneliti bahas dalam disertasi ini adalah sama mengenai konsep isu multikultural, kemudian perbedaannya pendidikan multikultural di pesantren yang peneliti temukan dari hasil penelitian adalah hasil lulusan yang multikultur bukan dari proses pembentukan formal akan tetapi hasil dari pembentukan lingkungan pesantren itu sendiri, maka kurikulumnya tidak tertulis dengan nyata dalam kegiatan proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan multikultural yang digunakan dalam kedua pesantren yang diteliti ini adalah (hidden curriculum).

#### **E. Kerangka Berpikir**

Horace Kallen<sup>34</sup> merupakan orang pertama yang mengkonstruksi teori plurisime budaya (*cultural pluralism*). Menurutnya, jika berbagai kebudayaan yang beragam atau perbedaan yang bervariasi itu dibiarkan hidup dan berkembang dalam suatu bangsa, maka upaya kearah persatuan nasional telah dilakukan. Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai dan lain-lain; budaya itu dapat disebut *pluralisme budaya (cultural pluralism)*. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horace Kallen. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional, selanjutnya setiap etnik dan kelompok budaya dalam suatu bangsa menjadi penting dan unik karena semua memberi kontribusi terhadap pengayaan kebudayaan.

Tak bisa dipungkiri, bumi sebagai tempat hunian umat manusia adalah satu. Namun, telah menjadi sunnatullah, para penghuninya terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Dengan demikian kemajemukan adalah fenomena yang tak bisa dihindari. Keragaman terdapat di pelbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Horace Kallen. *Cultural Pluralism and the American Idea*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1956

<sup>35</sup>Muqsith Ghazali, Abd. *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Bertradisi Al-Qur'an*, (Depok, Kata Kita, 2009), 1.

Indonesia merupakan Negara dan bangsa yang besar. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang sangat heterogen. Keragaman sosial, etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain merupakan karakter yang melekat pada kehidupan masyarakat yang ada di negara RI. Ada dua kemungkinan yang bisa muncul dari keragaman ini, mungkin bisa berakibat positif dan mungkin juga negatif. Keragaman ini bisa berakibat positif bila dikelola dengan baik, karena pada prinsipnya keragaman itu bisa memunculkan beragamnya ide, gagasan dan informasi. Apabila perbedaan ini bisa disatukan dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh, maka hal ini akan menjadi kekayaan budaya dan keilmuan yang sangat berguna bagi bangsa ini.

Keragaman juga bisa berakibat negatif bila keragaman ini tidak bisa dimanage dengan baik oleh bangsa ini. Mereka akan membentuk kelompok-kelompok yang terpisah dan saling menjauh yang akhirnya memunculkan pertentangan, perpecahan dan gontok-gontokan.<sup>36</sup> Apalagi keragaman yang menyangkut masalah agama yang pada umumnya sangat sensitif, sangat mudah terpropokasi sebagaimana kita lihat sekarang dalam kenyataan sehari-hari. Kejadian Sampang, Tanjung Priuk, Haur Kuning, Tasikmalaya, dan sebagainya, merupakan beberapa contoh betapa sensitifnya kondisi keragaman agama ini dalam memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu perlu dicari bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga keragaman agama ini tidak menjadi pemicu konflik di masyarakat.

Ada banyak agama dan kepercayaan di Negara dan bangsa Indonesia seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan juga beratus agama dan kepercayaan setempat yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal mereka. Keragaman agama ini pada dasarnya merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, karena hal ini merupakan sunatullah yang tidak bisa diganggu gugat dan merupakan kehendak Sang Pencipta alam sendiri.<sup>37</sup> Bila keragaman

---

<sup>36</sup>Arr-Ruum, ayat 31-32, "Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka" (Mufassir, Enam Ringkasan Tafsir), 165.

<sup>37</sup>Ar-Ruum, ayat 13 "Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-



agama dan kepercayaan ini tidak dimanage dengan baik, sudah bisa dipastikan akan menjadi hal yang sangat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kita kaji dengan lebih mendalam, pada umumnya penganut agama cenderung menganggap kelompok agamanya yang paling benar. Dalam kajian sosiologi agama, watak tersebut dinamakan *truth claim* (klaim kebenaran). Klaim kebenaran (*truth claim*) inilah yang menjadi karakteristik dan identitas suatu agama, di mana tidak ada agama tanpa klaim kebenaran. Sebab, tanpa adanya *truth claim* maka agama tidak akan memiliki kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya. Watak dasar inilah yang kemudian melahirkan kristalisasi iman (*faith*) dan kecintaan terhadap suatu agama yang diyakininya, serta mendorong timbulnya minat untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran-ajarannya (dakwah atau misi, zending dan sebagainya), bahkan mempertahankan eksistensi agamanya.<sup>38</sup>

Pemerintah negara Republik Indonesia menyadari benar adanya keragaman ini. Berdasarkan kesadaran inilah pemerintah bersama para tokoh negara yang terdiri dari tokoh agama, budayawan dan sosial, bersama-sama menyusun sebuah konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut “Pluralisme dalam konteks Indonesia”. Pluralisme dalam konteks Indonesia, dimaknai sebagai kemajemukan, keberagaman, atau kebinekaan. Keberagaman bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial (pluralitas), melainkan juga sebagai gagasan-gagasan, paham-paham, dan pikiran-pikirannya. Kebinekaan di Negara RI sudah berlangsung berabad-abad, jauh sebelum negara ini terbentuk. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi NKRI menyatakan secara jelas bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Atas dasar undang-undang ini, semua warga negara,

---

suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti”

Al-Kafirun, ayat 1-6, “(1) Katakanlah (Muhammad) wahai orang-orang Kafir! (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (3) Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (5) Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah (6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

<sup>38</sup>Dadang Kahmad, Prof. Dr. *Multikulturalisme, Islam dan Media* (Bandung, Pustaka Jati, 2013), 21.

dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, wajib dilindungi oleh negara. Ini juga berarti negara tidak boleh mendiskriminasi warganya dengan alasan apa pun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan konstitusi tersebut.<sup>39</sup> Inilah pluralitas ala Indonesia sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh kalangan masyarakat hari ini.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, sebagaimana dijelaskan di atas, baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial, tentu akan memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakatnya. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Ahmadiyah, Sunni dan Syi'ah dan konflik-konflik lainnya telah menyadarkan kita bahwa negara ini masih berada dalam ancaman disintegrasi bangsa sehingga kalau hal ini terus dibiarkan sangat memungkinkan terciptanya disintegrasi bangsa yang sangat mengancam NKRI. Oleh karena itu, negara dan bangsa yang besar ini sangat perlu mencari sebuah cara yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal-hal yang negatif sebagai akibat dari keragaman tersebut. Salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan keragaman yang ada di Negara Republik Indonesia, dengan slogan kehidupan bernegara "Bhineka Tunggal Ika", ini adalah dengan mencari pola atau model Pendidikan Multikulturalisme

Sebenarnya usaha mencari solusi ini sudah dilakukan oleh para tokoh terdahulu kita, yaitu dengan konsep pluralisme sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ada beberapa istilah yang kelihatannya agak mirip dalam hal memperbincangkan keberagaman dan kebebasan di dalam kelompok masyarakat, ada Bhineka tunggal Ika, pluralisme, Multikulturalisme, Diversity dan lainnya. Agar tidak membingungkan kita dan pembaca, sebaiknya kita ulas dulu beberapa kata dan istilah yang kelihatannya mirip tapi tidak sama baik secara konsep-konsep maupun implementasinya.

---

<sup>39</sup>Muqsih Ghazali, Abd. *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Bertradisi Al-Qur'an*, (Depok, Kata Kita, 2009), xiii

Sebenarnya ada tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang berisikan keragaman tersebut, baik keberagaman agama, ras bahasa, dan budaya. Ketiga istilah tersebut adalah; pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas menunjukkan adanya hal-hal yang lebih dari satu (*many*) namun kedaanya bisa disatukan, sementara keragaman (*diversity*) menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan keadaanya tak dapat disamakan.

Dibandingkan dua konsep terdahulu yaitu pluralitas dan diversity, secara konseptual terdapat perbedaan yang signifikan antara pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*) dan multikultural. Menurut Azyumardi Azra, inti dari multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekedar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik.<sup>40</sup>

Pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Lee Manning and Baruth mendefinisikan *Multicultural Education is both a concept and deliberate process designed to: 1) teach learners to recognize, accept, and appreciate cultural, ethnic, social class, religious, and gender differences. 2) Instill learners during these crucial developmental years a sense of responsibility and commitment to work toward the democratic ideals of justice, equality and democracy.* Definisi ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural adalah

---

<sup>40</sup>Agus Iswanto, "Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikulturalisme" (Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta: 2009), 6-7.

konsep yang membawa siswa untuk mengakui, menerima dan menghargai budaya, etnik, kelas sosial, agama, perbedaan gender dan membimbing siswa selama proses perkembangannya agar punya rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap penghidupan cita-cita keadilan, persamaan dan demokrasi.

Sementara Crendall dalam Dawam mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman etnis, ras, agama dan budaya. Bank and Bank, sebagaimana yang dikutip Azyumardi Azra juga mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai bidang kajian dan disiplin yang muncul yang tujuan utamanya menciptakan pendidikan yang setara bagi siswa tentang etnis, ras kelas sosial dan kelompok budaya yang berbeda.

Dalam menegaskan konsep dasar pendidikan multikultural, Tilaar, sebagaimana dikutip Dody S. Truna, mengacu kepada konsep C. I. Bennet yang menunjukkan dua aspek mendasar, yaitu nilai inti dan tujuan pendidikan multikultural. Nilai-nilai inti tersebut mencakup: (1) Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat; (2) Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; (3) Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan (4) Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Berdasarkan nilai inti tersebut maka dirumuskan enam tujuan, yaitu: (1) mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat; (2) memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat; (3) memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat; (4) membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka; (5) mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi; dan (6) mengembangkan keterampilan aksi sosial.

Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan di atas, tampaklah jelas bahwa semua pendapat dan interpretasi tentang pendidikan multikultural mengarah pada tujuan yang sama yaitu bagaimana lewat pendidikan mampu mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur dan sejahtera dengan tanpa mempertentangkan perbedaan ras, etnik, agama dan budaya. Selain itu pendidikan multikultural dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan seluruh

potensi manusia serta menghargai pluraritas dan heterogenitasnya sebagai konsekwensi dari keragaman budaya, ras, etnis, status sosial dan agama (aliran). Dengan demikian pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia darimanapun latar belakangnya.

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang besar dan mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun negara dan bangsa Indonesia dari sejak pra-kemerdekaan, kemerdekaan, bahkan sampai sekarang. Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut Nahdlatul Ulama ini bersifat menjaga hal-hal baik yang dilakukan para pendahulu dan mengambil hal baru yang lebih baik dibanding yang terdahulu. Oleh karena itu keberadaan Nahdlatul Ulama pada intinya untuk menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada yang menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa. Olehkarena itu keberadaan Nahdlatul Ulama tidak bertujuan menghapus nilai-nilai baik yang telah ada tersebut, tapi menyempurnakan agar menjadi hal yang lebih baik (*Al-Muhafadotu 'ala al-qodimi al-sholih wa al-ahdu bi al-jadidi al-ashlah*).

Oleh karena itu keberadaan Nahdlatul Ulama bukan untuk merubah tatanan masyarakat yang sudah ada secara total, tapi keberadaan Nahdlatul Ulama adalah untuk menyempurnakan tatanan masyarakat yang masih kurang dengan tetap menjaga berbagai keadaan yang sudah ada sembari memperbaiki tatkala ada hal-hal yang perlu diadakan perbaikan. Oleh karena itu sikap NU selalu bertradisi pada sikap yang empat yaitu: 1) Sikap I'tidal yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berperilaku 'adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap ini Nahdlatul Ulama akan menghindari segala sikap yang bersifat ekstrim (*Tathorruf*) dan memaksakan kehendak (*al-Ikroh*) kepada siapapun; 2) Sikap Tasammuh yaitu sikap yang mencerminkan toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam sikap keagamaan (terutama dalam mas'alah furu' dan hilafiyah) maupun dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah dimiliki masyarakat

terdahulu, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Syara' dan masih bisa diadaptasikan kedalam tatanan yang Islami dan Syara'i. 3) Sikap Tawazun, Sikap ini merupakan sikap keseimbangan dalam berkhidmah, yaitu menyaserasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. 4) Amar Ma'ruf Nahyi Munkar, sikap ini adalah sikap yang mencerminkan kepekaan untuk selalu mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfa'at bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>41</sup>

Keempat dasar tersebut akan selalu memunculkan perilaku masyarakat Nahdlatul Ulama baik perseorangan maupun kelompok sebagai berikut ;

- a. Kasih mengasihi antar sesama
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam
- c. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
- d. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan, berkhidmah dan berjuang
- e. Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), Persatuan (*al-Ittihad*) serta Meluhurkan kemulyaan moral (*al-Akhlaq al-Kariimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*al-Sidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia
- j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara

---

<sup>41</sup>KH. Muchsin Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, 26-27.



Secara teoretis, hal-hal atau nilai-nilai tersebut di atas bila dikaitkan dengan paham pendidikan multikultural, terlihat sangat jelas bahwa nilai-nilai multikultural di Nahdlatul Ulama, secara teoretis, sangatlah kuat sehingga perlu kiranya dikaji bagaimana realitas di lapangan dan sejauhmana hal ini terjadi. Apabila antara konsep-konsep dan teori Multikulturalisme dan Organisasi Nahdlatul Ulama beririsan dengan sangat signifikan, sudah barang tentu konsep-konsep dan teori-teori pendidikan Multikultural dan konsep-konsep dan teori-teori pendidikan di organisasi Nahdlatul Ulama pun akan beririsan juga dengan secara signifikan. Inilah asumsi dasar dalam proses penelitian ini, dan asumsi ini perlu dibuktikan sejauhmana irisan antara pendidikan Multikultural dan proses pendidikan di Nahdlatul Ulama ini bisa dipertanggung jawabkan baik secara teoretis maupun secara praktis. Pada akhirnya konsep-konsep dan teori-teori yang ada baik dari konsep-konsep atau teori-teori multikultur maupun konsep-konsep atau teori-teori dari Organisasi Nahdlatul Ulama ini bisa jelas terverifikasikan dan bisa diambil manfa'atnya dan juga digunakan di lembaga dan tempat yang lainnya. Kajian kritis dan mendalam tentu harus dilakukan dengan harapan nilai-nilai multikultural di Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu penulis akan melakukan studi atau penelitian dengan fokus masalah pada **“Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Proses Pendidikan Pesantren yang Bertradisi Nahdlatul Ulama”**.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengkaji visi, misi, tujuan dan kurikulum serta riwayat berdirinya
  - a. Visi, Misi dan tujuan
  - b. Kurikulum dan program Inovasinya
  - c. Keadaan Personil pengurusnya
  - d. Keadaan Santrinya
2. Pendidikan yang ada di pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama. Kajian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap AD ART

dan Renstra (Rencana dan Strategis) yang dimiliki oleh Pesantren tersebut. Selain studi dokumentasi, dilakukan juga **wawancara** dengan teknik *In Dept Interview* yang dilakukan terhadap para tokoh yang ada di pesantren bertradisi Nahdlatul Ulama tersebut. Untuk lebih meyakinkan data dihasilkan dari wawancara dengan para tokoh atau pemangku jabatan di pesantren tersebut, peneliti juga melakukan **wawancara** dengan teknik *In Dept Interview* dengan para tokoh Nahdlatul Ulama yang benar-benar mengerti dan mengetahui tentang AD ART Nahdlatul Ulama.

3. Mengkaji proses pendidikan pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya dikaji tentang Proses pendidikan yang dilakukan di Pesantren Berbasis Nahdlatul Ulama dan Nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada dalam proses pendidikan pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan melalui Observasi langsung dan Participant Observation, Untuk Observasi langsung, peneliti sebagai pelaku utama, dan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung hal-hal pokok tentang apa-apa yang terjadi dalam proses pendidikan di Pesantren tersebut. Untuk hal-hal yang lebih detailnya peneliti memilih informan sebagai pelaku dari *observasi participatory* atau *participant observation*. Hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu proses penelitian, karena dengan adanya dua lokasi yang berjauhan yaitu Pesantren al-Hikam Depok Jabar dengan Tebuireng Jombang Jatim, tidaklah mungkin penulis bisa melakukannya tanpa ada bantuan observer lain.
4. Mengkaji model pendidikan multikultural yang bisa diimplementasikan di Negara dan bangsa Indonesia berdasarkan pola/sistem pendidikan di pesantren yang bertradisi Nahdlatul Ulama. Untuk mengkaji hal ini, Peneliti memformulasi hasil temuan dari penelitian, sehingga menjadi Model Pendidikan Multikultural yang bisa di implementasikan di Negara Indonesia sesuai kebutuhan kondisi masa kini. Tentu hal ini

tidaklah mudah, untuk mempermudah dalam memformulasi Model Pendidikan Multikultural ala Indonesia, peneliti melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh budayawan, tokoh sosiologi dan tokoh masyarakat, sehingga formulasi Model Pendidikan Multikultural yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya. Di samping itu tentu basis teori pun digunakan dalam rangka memperkuat Model Pendidikan Multikultural yang diharapkan.

Bagan 1.1

Berikut Kerangka Penelitian Nilai-Nilai Pendidikan Multikultur di Pondok Pesantren Bertradisi Nahdlatul Ulama

